

PERANAN PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK DI DPR-RI PERIODE 2014-2019

Tirta Purnama Aji
Universitas Mercu Buana
tirtapurnamaaji@yahoo.com

Abstrak. Jumlah perempuan di dunia menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Sejak pasca reformasi, perempuan terus aktif dan gigih melalui berbagai gerakan untuk memperluas kesetaraan perannya. Perempuan kini telah mendapatkan haknya mengenai keterlibatan atau kewajibannya dalam kegiatan/daftar calon legislatif sebanyak 30 persen jumlah kouta. Khususnya ini terjadi di DPR, lembaga tinggi ketatanegaraan yang memiliki rangkaian tugas untuk merangkai rancangan undang-undang dan otoritas menerima, membahas bahkan membatalkan serangkaian RUU yang diusulkan Pemerintah. Pada periode 2014-2019 ini, jumlah keseluruhan Anggota DPR berjumlah 553 orang, yang terdiri dari 450 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 103 orang perempuan. Mereka terdiri dari berbagai fraksi yang mempunyai kursi di kepemimpinan DPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivisme, metode studi kasus, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara mendalam. Teori menggunakan teori organisasi dan struktur empat model aliran yang dikemukakan oleh McPhee dan Pamela Zaug. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan khususnya dibidang yang memperjuangkan hak-hak dan aspirasi perempuan.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Kepemimpinan Politik, Anggota DPR-RI

Abstract. The number of women in the world ranks is the highest compared to the number of men. Since post-reformation, women have been active and persistent through various movements to expand their equality of roles. Women now have their rights regarding their involvement or obligations in the legislative candidate list / activity as much as 30 percent of the total quota. In particular, this happened in the DPR, a high-ranking state institution that has a series of tasks to compile draft laws and the authority to accept, discuss and even cancel a series of bills proposed by the Government. In the 2014-2019 period, the total number of members of the DPR is 553 people, consisting of 450 men and 103 women. They consist of various factions who have seats in the leadership of the DPR. This research uses a qualitative approach, constructivism paradigm, case study method, data collection techniques are carried out by documentation and in-depth interviews. The theory uses organizational theory and the structure of four flow models proposed by McPhee and Pamela Zaug. The results of this study show that women have a very important role in decision making, especially in the fields that fight for women's rights and aspirations.

Key words: Role of Women, Political Leadership, Board Members of DPR-RI

PENDAHULUAN

Jumlah perempuan di dunia menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Hal ini juga terjadi khususnya di Indonesia. Perempuan merupakan mayoritas jumlah penduduk yang menempati Indonesia. Namun, keberadaan mereka di Indonesia tidak lebih dari sebuah mayoritas atau kelompok besar yang termarginalkan secara ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

Indonesia merupakan Negara demokrasi. Sebagai Negara demokrasi, Indonesia telah bertekad untuk menjamin kesetaraan diberbagai bidang, khususnya dibidang politik bagi seluruh warga

Indonesia, tak terkecuali kaum minoritas atau kelompok marjinal. Tetapi sering sekali perempuan-perempuan hampir selalu tidak dilibatkan pada proses pengambilan kebijakan atau keputusan.

Sejak pasca reformasi, perempuan terus aktif dan gigih melalui berbagai gerakan untuk memperluas kesetaraan perannya. Hingga akhirnya, beberapa peraturan di Undang-Undang diciptakan. Mulai dari peraturan terkait partai politik, maupun pemilihan umum anggota DPR-DPRD. Perempuan kini telah mendapatkan haknya mengenai keterlibatan atau kewajibannya dalam kegiatan/daftar calon legislatif sebanyak 30 persen jumlah kouta.

Eksistensi perempuan di ranah publik tanah air dan keikutsertaannya pada masalah politik akhirnya mulai diakui dan didukung oleh Negara dengan berbagai dukungan. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan salah satu lembaga tinggi ketatanegaraan yang memiliki rangkaian tugas untuk merangkai rancangan undang-undang dan otoritas menerima, membahas bahkan membatalkan serangkaian RUU yang diusulkan Pemerintah.

Pada periode 2014-2019 ini, jumlah keseluruhan Anggota DPR berjumlah 553 orang, yang terdiri dari 450 orang berjenis kelamin laki-laki, dan 103 orang perempuan. Mereka terdiri dari berbagai fraksi yang mempunyai kusri di kepemimpinan DPR. Lantas, bagaimanakah peranan perempuan dalam kepemimpinan politik di DPR?

KAJIAN TEORI

Yogi Maulana Malik (Universitas Diponegoro, 2009), Evi Mulyasari Akmul (Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), Sandya Rani Yunita (Universitas Gajah Mada, 2015), dan Muklisah, Am.M.Pd (Jurnal Kependidikan Islam Volume 4, 2014) telah melakukan penelitian serupa dengan fokus penelitian peran perempuan sebagai objek penelitiannya. Secara keseluruhan penelitian yang dibahas pada penelitian terdahulu ialah seputar peran perempuan dalam bidang sosialnya. Adapun nilai kebaruan yang dilakukan pada studi ini adalah pada objek dan studi kasus penelitian yaitu peran kepemimpinan perempuan dibidang politik dalam lembaga tinggi Negara yaitu DPR.

Peran merupakan sesuatu yang sifatnya bisa berubah-ubah berdasarkan status atau kedudukan. Akan disebut suatu peran apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Peran dan kedudukan merupakan dua konsep yang saling berkesinambungan. Peran dalam studi ini adalah fokus pada kepemimpinan sebagai partisipasi perempuan dibidang politik.

Menurut Almond (1960:12), politik adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Rangkaian proses ini dapat dikatakan sebagai komunikasi, yaitu berinteraksi, berbagi gerakan, gambar, simbol, perangai, pakaian, maupun kata-kata yang diucapkan. Hal-hal atau komunikasi politik yang dilakukan perempuan di DPR-RI ini dapat dikatakan sebagai wujud partisipasi kepemimpinan politik.

Kepemimpinan politik merupakan bentuk wujud partisipasi politik, sebuah kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk ikut serta mendasari suatu pengambilan keputusan politik (Huntington dan Nelson, 1990). Warga Negara yang dimaksudkan dalam paparan tersebut adalah perempuan di DPR RI periode 2014-2019. Membahas perempuan maka erat kaitannya dengan gender atau kesetaraan.

Gender merupakan suatu kondisi atau atribut yang menciptakan perbedaan dan melekat pada perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh suatu norma atau budaya. Berdasarkan konsep tersebut, maka genderlah yang membentuk gagasan tentang apa yang dipandang pantas dilakukan atau diperbuat oleh perempuan maupun laki-laki (CIDA 2001:15).

Kemudian, Teori strukturasi dan Model Empat Aliran yang dikemukakan oleh McPhee dan Pamela Zaig menjadi peta dan inspirasi yang mengarahkan penelitian untuk dijadikan acuan dalam menganalisis fenomena dilapangan. Teori ini menjelaskan bahwa segala tindakan manusia merupakan proses menghasilkan sistem sosial. Ketika manusia berkomunikasi, secara

tidak langsung manusia telah menciptakan struktur atau seperangkat norma dari institusi sosial dan budaya. Negosiasi Keanggotaan, Penataan Diri Yang Reflektif, Koordinasi Kegiatan dan Positioning Kelembagaan merupakan empat aliran yang menjadi asumsi dalam teori ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma atau sudut pandang konstruktivisme. Data diperoleh dengan observasi non partisipan wawancara mendalam dan serangkaian studi dokumen. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Kriyantono (2009), Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif. Gambar, kata-kata menjadi sebuah data yang dikumpulkan berbentuk narasi dan bukan angka (Moleong, 2006). Penelitian deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta dan sifat objek tertentu, yaitu khususna dalam penelitian ini adalah peran kepemimpinan perempuan di DPR-RI sebagai objek dalam penelitian ini.

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut juga sebagai informan, yaitu orang atau sekelompok orang yang mengalami suatu peristiwa komunikasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Moleong, 2006). Adapun para informan dalam penelitian ini adalah anggota perempuan dari berbagai fraksi kepemimpinan di DPR-RI.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan Kunci (Key Informan)	
1	Meutya Hafid
2	Nurhayati Ali Assegaf
3	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
4	Tuti N. Roosdiono
5	Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis model Miles dan Huberman. Caranya dengan mereduksi atau penyederhanaan (data reduction), paparan/sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran perempuan di parlemen menjadi penting, terutama dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan. Sehingga mudah memperjuangkan hak-haknya dan dapat menyelesaikan masalah perempuan secara substansial dan serius.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen akan berdampak tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Masalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, dan lingkungan akan diatasi oleh perempuan jika mereka terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Pengalaman dan kepedulian perempuan dalam masalah-masalah itu membuat mereka berbeda dari laki-laki yang masih mendominasi sektor politik termasuk parlemen. Sulit mengharapkan anggota laki-laki di parlemen untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan ketika mereka tidak pernah memahami dan mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan perempuan.

Dalam konteks peranan perempuan dalam kepemimpinan politik di DPR, para anggota DPR melihat banyak agenda publik yang harus diperjuangkan, seperti contohnya dalam pembahasan undang-undang air, undang-undang tanah, undang-undang kekerasan seksual,

pengawasan terhadap anggaran, manajemen birokrasi dalam penggunaan anggaran. Selain itu juga karena kuota perempuan dalam UU pemilu, sehingga mereka mempunyai kewajiban ke kelompok perempuan dan mempunyai kesempatan yang sama untuk beradu kompetisi dan kapasitas akan jadi insentif bagi politisi untuk bekerja sebaik-baiknya. Menjadi wakil kelompok masyarakat perempuan juga menjadi salah satu motivasi utama, karena yang kita tahu sudah ada kebijakan 30% keterwakilan perempuan namun jumlah Anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan masih dibawah target. Oleh karena itu menjadi motivasi penting untuk para perempuan agar dapat mengisi kursi anggota DPR agar dapat berjuang bersama membantu hak kaum perempuan di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ditulis dapat di ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan perempuan adalah realitas yang nyata dan keberhasilannya tidak lepas dari peranan laki-laki. Hal terpenting adalah meyakini dan memulai membangun persepsi baru tentang kepemimpinan perempuan.

Perempuan berperan penting di DPR-RI dalam mengambil keputusan, khususnya mereka ingin memperjuangkan hak, kewajiban dan aspirasi tentang perempuan. Sehingga menjadikannya rancangan undang-undang atau menjadikan undang-undang yang dapat disahkan di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

Web & Jurnal

- Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, www.dpr.go.id Anggota DPR RI Periode 2014-2019 www.dpr.go.id diakses pada 25 Juni 2018.
- Yogi Maulana Malik, Jurnal Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI P) Kota Cirebon, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, <https://media.neliti.com/media/publications/104625-ID-analisis-peranperempuan-dalam-partai-po.pdf>, diakses pada 4 Maret 2018.
- Herita Dewi, Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender, <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/8277>, diakses pada 4 Maret 2018.
- Firdaus Finken, Pentingnya Peran Perempuan Dalam Kancah Perpolitikan, https://www.kompasiana.com/firdausfirken/pentingnya-peran-perempuandalam-kancah-perpolitikan_54f7b908a33311707a8b4c42, diakses pada 4 Maret 2018.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sudah Ada Presiden Perempuan, Seskab: Dalam Hal Kesetaraan Gender Indonesia Lebih Beruntung,
- Tips Serba Serbi, Pengertian Partisipasi Politik Menurut Para Ahli, <https://tipsserbserbi.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-partisipasi-politikmenurut.html> diakses pada 30 Maret 2018.
- Hastanti Widy, Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Ditinjau dari Perspektif Filsafat Politik Hannah Arendt, https://www.researchgate.net/publication/287682479_PERAN_POLITIK_PEREMPUAN, diakses pada 1 Mei 2018.
- Prof. Dr. Agnes Widanti, Hukum Berkeadilan Jender, Kompas, Hlm. 29
- Herien Puspitawati, Konsep, Teori, dan Analisis Gender, ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf, Hlm.4, diakses pada 1 Mei 2018.
- Dedy N.Hidayat, Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik. (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), Hal. 3
- E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. (Depok:

- LPSP3, 2007). Hal. 22-23
<https://pakarkomunikasi.com/teori-feminisme-menurut-para-ahli>
 Puji Lestari, *Feminisme Sebagai Teori dan Gerakan Sosial di Indonesia*, diakses pada 30 Maret 2018.
 Mukhlisah, AM. M.Pd. Persepsi tentang kepemimpinan perempuan; scientific and religious reviews. *Jurnal Kependidikan Islam* volume 4, Nomor 1, Tahun 2014. <http://mercubuana.ac.id/>
 Tri Marhaeni Pudji Astuti. *Citra Perempuan Dalam Politik*. *Jurnal Studi Gender & Anak*.
 Fitira Damayanti, S.E., M.M.. Peran kepemimpinan wanita dan keterlibatannya dalam bidang politik di Indonesia. *Jurnal aspirasi* Vol.5 No.2 Februari 2015.
 Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 62

Buku

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2.
 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 2.
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*, hlm. 46
 Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017*. Hlm. 7.
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017*. Hlm. 8. <http://mercubuana.ac.id/>
 Burhan Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008). Hal. 135
 Mohammad Zamroni, *Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender*, hlm 116.
 George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), 121.
 Dan Nimmo, 1978. "Political Communication and Public Opinion in America". Dalam *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. (terj. Tjun Surjaman), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989, hal.19.
 Edriana Noerdin, *Potret kemiskinan perempuan*, Woman Research Institute, Jakarta. Hal. 1
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
 Sugihastuti, Itsna hadi saptiawan. *Gender & Inferioritas perempuan*. Pustaka Pelajar. Hlm. 75-76.
 Morris. *Teori komunikasi individu hingga massa*. Kencana 2013. Hlm.188
 Morris. *Teori komunikasi individu hingga massa*. Kencana 2013. Hlm. 55
 Muh. Fitrah, S.Pd. M.Pd & Dr. Luthfiyah, M.Ag. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak, 2017. Hlm 39
 Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si. *Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*. Rineka Cipta 2016. Hlm 42
 Stephen W. Littlejohn. *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*. Salemba Humanika 2017. Hlm 349
 Stephen W. Littlejohn. *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*. Eleventh Edition. Waveland Press, Inc 2017. Hlm 303
 Indiwana Seto Wahyu Wibowo, op.cit., 27-28